



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Indeks *Regional Well-being* Sebagai Instrumen
Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah

Edisi XLVI – Desember 2024

Explore More



EXECUTIVE SUMMARY



- LPEFD edisi terakhir di bulan Desember 2024 ini membahas tentang *Indeks Regional Well-being* sebagai alternatif indikator kesejahteraan yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Hal ini selaras dengan arah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pilar **Penguatan Well-being** yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat dari aspek multidimensi mulai dari aspek *income* sampai pada aspek lingkungan yang berkelanjutan.
- **Bagian awal tulisan ini** membahas tentang latar belakang pendekatan Well-being dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan bagaimana OECD mengembangkan *framework* well-being yang telah diimplementasikan pada banyak negara di dunia utamanya di negara-negara yang tergabung dalam OECD. *Framework* yang dibangun oleh OECD ini mencakup dimensi kesejahteraan saat ini dan sumber daya untuk kesejahteraan masa depan, seperti modal ekonomi, modal alam, modal manusia, dan modal social.
- Pada **bagian kedua**, bagaimana kerangka well-being diterjemahkan dalam pembangunan Indeks Regional Well-being (IRW) di Indonesia akan disajikan. Dimulai dengan penjelasan secara garis besar tentang indikator-indikator pembentuk Indeks *Well-being* di Indonesia yang mengadopsi *Framework* OECD, yaitu pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran, kondisi dan kepadatan rumah tangga, harapan hidup, tingkat pendidikan menengah tenaga kerja, kualitas lingkungan, akses layanan internet dan kesehatan, tingkat kriminalitas sebagai indikator keamanan, dan tingkat kepuasan hidup yang diambil dari tingkat kesehatan mental dan rekreasi. Penekanan indikator-indikator ini adalah pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan indikator well-being ini terhadap pencapaian pembangunan ekonomi inklusif serta menguji tingkat robustness dari model IRW ini, maka dilakukan analisis korelasi dan regresi panel data untuk mengevaluasi hubungan antara IRW dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Hasil korelasi menunjukkan hubungan positif dengan koefisien sebesar 0,57, mengindikasikan bahwa peningkatan IPEI beriringan dengan kenaikan IRW. Regresi data panel menggunakan metode random effect (RE) menunjukkan pengaruh signifikan IPEI terhadap IRW. Analisis ini dilakukan setelah memastikan model yang sesuai melalui uji Hausman dan Lagrange Multiplier (LM). Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa IRW dan IPEI selaras dalam mendorong pembangunan inklusif. Hal ini memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang menekankan pada pemerataan hasil pembangunan melalui peningkatan IPEI dan penguatan indikator kesejahteraan (IRW).
- **Pada bagian ketiga laporan ini**, disajikan praktik baik dari negara lain dalam mengadopsi kerangka indikator well-being OECD dalam pengelolaan anggarannya. Dalam membangun dan mengimplementasikan indikator well-being, Indonesia dapat belajar pada Australia dalam mengadopsi indikator inlusif, melibatkan publik dan memastikan kebijakan berbasis data untuk pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2022. Australia mengintegrasikan kerangka well-being ke dalam penganggaran (*well-being budget*) dengan lima tema utama: *healthy, secure, sustainable, cohesive, and prosperous*, yang dijabarkan dalam 50 indikator. Framework ini dikembangkan melalui konsultasi publik dan berbasis data untuk memantau kesejahteraan lewat dashboard interaktif.
- LPEFD ini diakhiri dengan rekomendasi bagaimana Penerapan Indeks Regional Well-being (IRW) di Indonesia yang dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan IRW dalam perencanaan daerah, kebijakan pemerintah akan lebih responsif terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.
- Strategi Implementasi IRW dapat difokuskan kepada pemanfaatannya sebagai dasar pelaksanaan program kesejahteraan pengalokasian anggaran, penilaian keberhasilan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah, dan dapat digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan yang lebih holistik yang mencakup sosial dan lingkungan.

DAFTAR ISI

Executive Summary	2
Daftar Isi	3
Pendekatan Kesejahteraan yang Lebih Inklusif dengan Menggunakan OECD Well-being Framework	4
Indeks Regional Well-being: Penerapan OECD Well-being Framework ke dalam Konteks Indonesia	9
Framework Well-being pada Kebijakan Pemerintah di Australia dan Bagaimana Indonesia dapat Menerapkannya ke Depan	16

Pendekatan Kesejahteraan yang Lebih Inklusif dengan Menggunakan OECD *Well-being Framework*



Kesejahteraan adalah tujuan utama negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila ke-4 Pancasila. Negara berupaya meningkatkan kesejahteraan warga dengan mengevaluasi perkembangan dan pemerataannya. Mengukur kesejahteraan penting untuk menentukan tingkat hidup dan merumuskan kebijakan. Secara tradisional, kesejahteraan diukur berdasarkan kepemilikan sumber daya seperti penghasilan, aset, atau konsumsi. Banyak negara menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran utama karena data mudah diperoleh dan distandardisasi. Tingginya pertumbuhan PDB terkait dengan peningkatan taraf hidup melalui lapangan kerja, upah, dan akses barang serta jasa.

Namun demikian, ukuran makroekonomi seperti PDB tidak dapat menggambarkan kesejahteraan individu secara akurat. PDB memiliki keterbatasan dalam mengukur pendapatan dan konsumsi masyarakat (OECD 2011). Selain itu, PDB tidak menunjukkan distribusi sumber daya ekonomi antar individu. Bahkan, beberapa dampak dari aktivitas yang meningkatkan PDB, seperti kemacetan dan polusi industri, justru menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencari suatu metode pengukuran kesejahteraan yang lebih baik terus dilakukan, salah satunya oleh OECD. Inisiatif tersebut bertujuan untuk melibatkan komunitas internasional dalam pembahasan tentang aspek apa dalam kehidupan manusia yang harus diusahakan untuk dicapai. Upaya ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi beberapa indikator yang menggambarkan secara lebih akurat perkembangan kehidupan manusia. Dengan demikian, ukuran kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat menghasilkan perumusan kebijakan publik yang lebih fokus dan terarah.

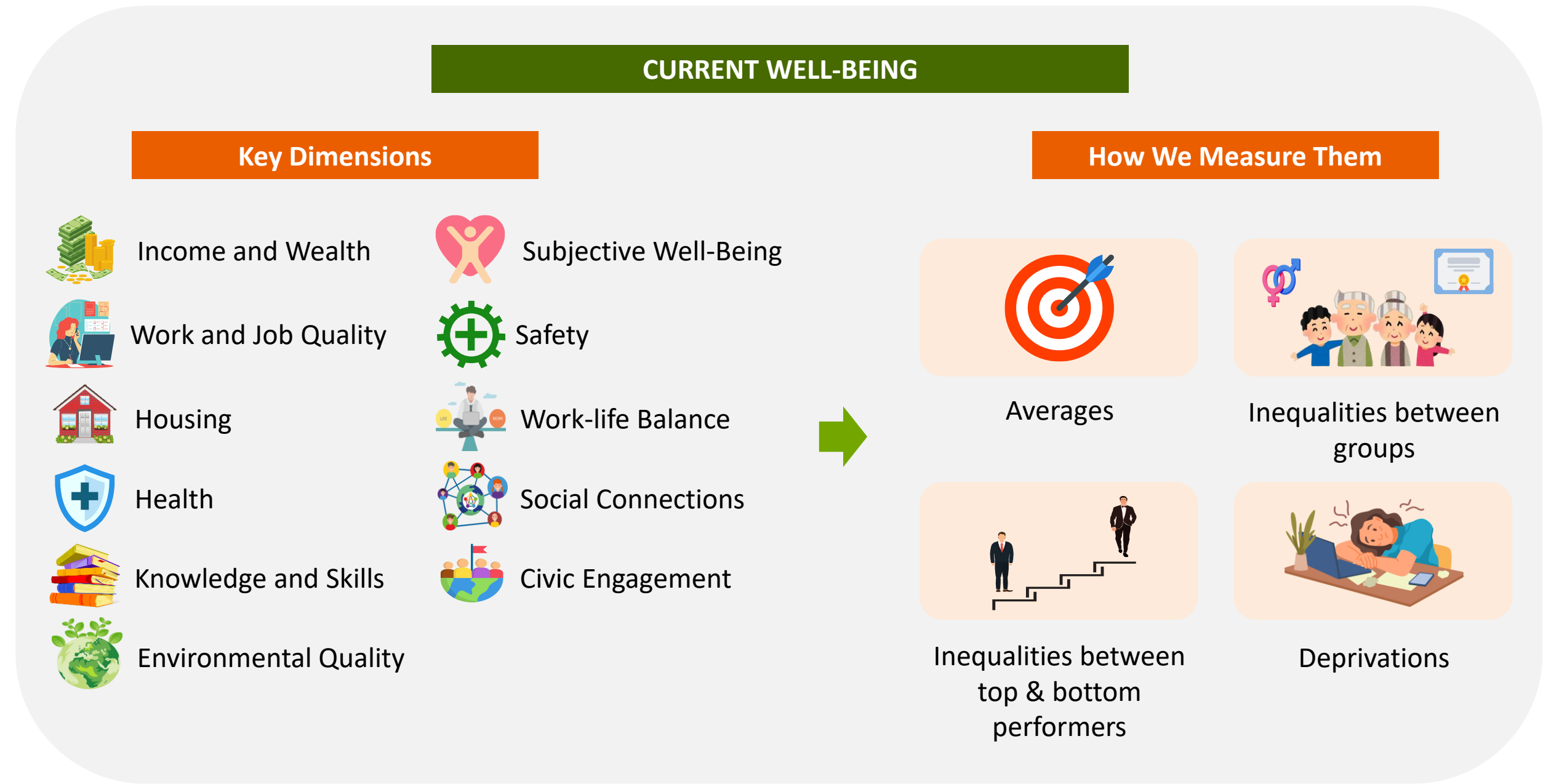
Framework Well-Being OECD

Setelah melalui diskusi yang panjang, OECD merilis *framework well-being* pada tahun 2011 melalui penerbitan laporan “*How’s Life?*” yang menjadi pedoman untuk menilai apakah kehidupan masyarakat di negara-negara OECD secara umum membaik atau tidak. *Framework* ini berlandaskan pada “*capabilities approach*” yang diusung oleh Sen (1984) dan Alkire and Sarwar (2009) di mana kesejahteraan manusia dapat diukur secara langsung dengan melihat kemampuan seseorang, yaitu apa yang mereka bisa lakukan dan kebebasan yang mereka miliki untuk memilih menjadi apa. Pendekatan ini berbeda dengan “*welfarist-approach*” yang hanya berfokus pada pencapaian seseorang dan mengabaikan faktor kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai outcome tertentu. Dengan demikian, kesejahteraan berdasarkan framework well-being OECD memiliki cakupan dan pengertian yang lebih luas daripada “welfarist-approach”.

Berlandaskan konsep dan pendekatan tersebut, framework well-being dari OECD menawarkan empat fitur utama. Pertama, *framework* ini **fokus ke orang** (individu atau rumah tangga), kondisi mereka, dan bagaimana hubungan mereka dengan komunitas tempat mereka tinggal dan bekerja. Kedua, *framework* ini menaruh perhatian pada **outcome dari well-being**, yang tidak hanya melihat *input* atau *output*, karena *outcome* memberikan informasi yang lebih riil mengenai kualitas kehidupan seseorang. Ketiga, distribusi kesejahteraan di dalam populasi diperhitungkan, khususnya kesenjangan antar kelompok umur, gender, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Terakhir, *framework* ini mempertimbangkan dua penilaian kesejahteraan, baik yang sifatnya objektif maupun subjektif, karena pengalaman dan penilaian seseorang atas kondisi kehidupannya memberikan tambahan informasi penting dalam pengukuran yang sifatnya objektif.

Framework well-being tidak hanya menggunakan dimensi yang fokus pada tingkatan individu, rumah tangga, dan komunitas, tetapi juga dilengkapi dengan statistik mengenai sumber daya yang membantu kesinambungan *well-being* di masa mendatang, khususnya melalui empat macam sumber daya, nilai investasi negara atau tingkat kerusakan atas sumber daya tersebut, dan faktor risiko serta ketahanan yang mempengaruhi perubahan *well-being* di masa mendatang. Dengan memisahkan antara komponen *well-being* saat ini dan faktor yang mempengaruhi keberlanjutannya, pengambil kebijakan dapat lebih mudah menilai apakah meningkatkan aspek yang pertama akan menurunkan aspek yang kedua dan sebaliknya. Hal ini dapat memberikan informasi mengenai *trade-off* antar waktu dalam perumusan kebijakan dan mengindikasikan proyeksi kesejahteraan lintas generasi di dalam suatu negara. Dengan demikian, *framework* ini menjamin pendekatan yang lebih komprehensif untuk menentukan *well-being*, inklusivitas, dan kesinambungan.

Gambar 1 - Framework Well-Being OECD (current)



Sumber: OECD (2024) *How's Life? 2024: well-being and resilience in times of crisis*

Berdasarkan waktu, dimensi-dimensi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia dalam framework well-being dibedakan menjadi dua, yaitu *current* dan *resources for future well-being*. *Current well-being* mencakup sebelas dimensi yang mempengaruhi *well-being* seseorang pada saat ini. Tiga dimensi pertama merupakan aspek yang bersifat materi dan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang, antara lain penghasilan dan kekayaan, pekerjaan dan kualitas pekerjaan, serta rumah. Sementara itu, delapan dimensi lainnya berkaitan dengan kualitas hidup seseorang yang meliputi, seberapa layak kehidupan seseorang dan bagaimana seseorang mempersepsikan kehidupannya, apa yang mereka tahu dan dapat mereka lakukan, dan seberapa sehat serta aman tempat tinggal mereka (kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, kualitas lingkungan, subjektif *well-being*, dan keamanan). Selain itu, kategori kualitas kehidupan juga mencakup dimensi mengenai hubungan antar individu dalam komunitas, atau seberapa terhubung dan aktif masyarakat terlibat dalam lingkungannya, dan bagaimana serta dengan siapakah masyarakat menghabiskan waktu mereka (*work-life balance*, keterhubungan sosial, dan partisipasi masyarakat).

Gambar 2 - Framework Well-Being OECD (resources for future)



Sumber: OECD (2024) *How's Life? 2024: well-being and resilience in times of crisis*

Karena indikator yang menunjukkan rata-rata nasional seringkali menyembunyikan kondisi ketimpangan antar kelompok dalam populasi, distribusi dari “*current well-being*” diperhitungkan dengan melihat tiga tipe ketimpangan. Pertama, ketimpangan antara kelompok dalam populasi, seperti antara pria dan wanita, antara penduduk usia tua dan muda, dll. yang secara bersama-sama menggambarkan ketimpangan horisontal. Kedua, ketimpangan antara individu yang berada di atas dan di bawah pada skala pencapaian setiap dimensi yang merepresentasikan ketimpangan vertikal. Terakhir, tingkat deprivasi (ketertinggalan) yang ditunjukkan dengan proporsi individu yang berada di bawah ambang batas tertentu, seperti tingkat keterampilan atau kesehatan minimal.

Sementara itu, *resources for future well-being* merupakan sumber daya strategis yang mendukung well-being di masa mendatang dan direpresentasikan oleh empat tipe modal (*capital*), yaitu ketersediaan modal di masa mendatang yang dipengaruhi oleh keputusan untuk mengeksploitasinya atau tidak pada saat ini. Pertama, *economic capital*, mencakup aset fisik (bangunan dan mesin), aset intelektual, dan aset finansial. Berikutnya, *natural capital*, meliputi aset yang tersedia secara natural dan ekosistem, mulai dari barang-barang yang diperjualbelikan seperti mineral (barang tambang) dan kayu sampai dengan lautan dan atmosfer. Kemudian, *human capital*, merujuk ke keterampilan dan kesehatan seseorang di masa mendatang setiap individu. Terakhir, *social capital*, terdiri dari norma sosial, nilai bersama, dan tata kelola yang mendukung kerja sama.

Beberapa modal yang tersedia melampaui batasan kepemilikan pribadi dan barang publik. Contohnya, emisi gas rumah kaca di satu negara mempengaruhi keseluruhan iklim di dunia. Dengan pertimbangan ketersediaan dan aliran modal tersebut, dashboard *How’s Life? Well-being* juga memperhitungkan beberapa faktor risiko dan ketahanan utama yang mungkin berpengaruh terhadap nilai well-being akibat ketersediaan dan perpindahannya di masa mendatang. Sebagai contoh, tingkat utang rumah tangga yang tinggi dapat memberikan risiko terhadap prospek ekonomi di masa mendatang.

Berdasarkan *framework* dan dimensi di atas, dipilihlah beberapa indikator. Kriteria utama yang harus dipenuhi oleh indikator-indikator yang dipilih adalah sebagai berikut:

-  Menangkap capaian *well-being* di level individu atau rumah tangga
-  Mengukur *outcome* dari *well-being*, bukan cara atau alat untuk mencapainya
-  Dapat diagregasi untuk menilai *well-being* pada kelompok yang berbeda
-  Dapat mengukur gabungan sebaran capaian

Indikator-indikator yang dipilih juga harus memenuhi kriteria standar statistik, antara lain:

-  *Face validity*, indikator yang dipilih harus mencerminkan konsep atau hal apa yang diukur
-  Fokus pada *outcome* utama, bukan pada spesifik komponennya
-  Dapat disesuaikan terhadap perubahan dan sensitif terhadap intervensi kebijakan
-  Dapat diperbandingkan antar negara
-  Umum digunakan dan diterima sebagai ukuran *well-being* di dalam komunitas ahli statistik dan akademisi
-  Memaksimalkan cakupan negara yang dapat diukur
-  Dikumpulkan secara periodik

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, konsep *well-being* yang digunakan oleh OECD bersifat multidimensi. Oleh karena itu, agar lebih mudah memahami dan membandingkan performa antar negara, nilai dari beberapa dimensi dan indikator ini dapat dijadikan satu menjadi indeks komposit. Namun demikian, indeks komposit seringkali dikritik karena dapat menghilangkan sebagian informasi di dalamnya serta adanya perdebatan mengenai mekanisme pembobotan pada setiap dimensi dan elemen-elemennya. *Better Life Index* yang disusun OECD mencoba mengatasi isu tersebut dengan menyediakan dashboard interaktif berbasis web yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan bobot pada setiap dimensi sesuai dengan persepsi mereka. Informasi mengenai capaian setiap dimensi juga tetap dijaga dengan menampilkan indeks *well-being* setiap negara dalam bentuk grafik menyerupai bunga dengan warna dan ukuran kelopak yang berbeda sesuai nilai dari setiap dimensi. Semakin tinggi nilai indeks *well-being* suatu negara, semakin tinggi posisi kelopak bunga pada sumbu y.

Gambar 3 - *Dashboard Interaktif Better Life Index OECD*



Berdasarkan laporan *How's Life? 2024*, rata-rata capaian *well-being* di negara-negara OECD cukup baik. Rerata penghasilan bersih rumah tangga relatif stabil, sementara rerata tingkat partisipasi kerja berada pada titik tertinggi pada kuartal pertama tahun 2024. Namun demikian, biaya hidup masih cukup membebani masyarakat, khususnya bagi rumah tangga rentan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase rumah tangga yang terbebani oleh biaya perumahan di sepertiga negara-negara OECD selama lima tahun terakhir. Meskipun rerata porsi masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara signifikan turun dari 30% menjadi 19% pada kurun waktu satu dekade sebelum pandemi Covid, tren ini kemudian melambat secara dramatis, di mana seperlima orang masih mengalami kesulitan finansial pada tahun 2023.

Kesenjangan *well-being* yang cukup besar antarkelompok juga masih menjadi permasalahan bagi negara-negara OECD. Selain tingkat upah pekerja pria yang lebih tinggi daripada wanita, kekerasan dan kematian akibat bunuh diri serta kasus overdosis masih menghantuipara pekerja wanita. Tingkat kesehatan, *well-being* subjektif, dan keterhubungan sosial generasi muda relatif lebih baik, sementara generasi menengah lebih mudah mencari pekerjaan dan merasa lebih aman. Kabar baiknya, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, mayoritas ketimpangan *well-being* pada kelompok umur dan gender telah mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan, pada sebagian kasus, capaian *well-being* dari kelompok yang terdeprivasi mengalami kenaikan lebih tinggi. Sebagai contoh, persentase wanita yang merasa aman berjalan pada malam hari meningkat lebih tinggi dibandingkan pria. Namun demikian, pada kasus yang lain, ketimpangan menyempit karena capaian *well-being* dari kelompok yang sebelumnya baik mengalami penurunan.

Beberapa indikator terkait kesinambungan memberikan pesan kepada para pembuat kebijakan untuk melakukan aksi yang lebih keras untuk menjaga *well-being* generasi mendatang. Rata-rata satu dari tujuh orang yang tinggal di negara-negara OECD terpapar panas ekstrem pada tahun 2023. Sementara itu, *The Red List Index*, yang menunjukkan risiko keragaman hayati, meningkat baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek.

Penggunaan *Framework Well-Being* di Berbagai Negara



Framework well-being OECD digunakan oleh beberapa negara untuk kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selandia Baru menggunakan *framework* ini untuk menyusun prioritas anggaran dengan indikator standar hidup layak. Denmark mengadaptasinya menjadi "*Good Life*" dengan 15 indikator sosial ekonomi dan 25 indikator persepsi, mendukung perencanaan pembangunan wilayah dan kolaborasi antar kota. Kanada memiliki *framework* "*Quality of Life*" dengan lima domain dan 84 indikator mencakup kesejahteraan, kesehatan, lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan. *Framework* ini digunakan sejak 2021 dalam analisis anggaran untuk meningkatkan pemahaman dampaknya dan identifikasi prioritas kebijakan masa depan berdasarkan capaian sebelumnya.

■ ■ ■ Rekomendasi Kebijakan dan Lesson Learned

Better Life Index merupakan ukuran kesejahteraan negara yang dibangun dengan *framework* yang inklusif dan komprehensif. Selain mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, *framework* ini juga mempertimbangkan aspek ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat, baik horizontal maupun vertikal. Lebih dari itu, aspek kesinambungan juga diperhitungkan untuk memprediksi kesejahteraan lintas generasi. Dengan menggunakan data yang rutin tersedia dan metode statistik yang sudah terstandarisasi, capaian *well-being* setiap negara dapat diperbandingkan dan diamati trennya dari waktu ke waktu. Prinsip inklusivitas juga diperhatikan dengan mengoptimalkan partisipasi publik, mulai dari tahap penyusunan *framework* hingga penentuan bobot setiap dimensi. Berbagai keunggulan *framework well-being* OECD ini menjadikannya sangat menarik bagi pembuat kebijakan dan telah diadopsi oleh berbagai negara dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan.

Memperhatikan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya pemerintah Indonesia mulai mengembangkan *framework well-being* sebagai alat untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan dan menggunakannya dalam perencanaan pembangunan nasional. Seperti beberapa negara yang telah mengadopsi *framework* ini, Indonesia dapat melakukan penyesuaian terkait dimensi dan indikator yang digunakan dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat, serta ketersediaan data. Yang terpenting, publik dan para ahli perlu dilibatkan dalam penyusunan *framework well-being* ini untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai konsep kesejahteraan. Partisipasi publik yang optimal tentunya juga akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat pada saat implementasi kebijakan.

Referensi

Alkire, Sabina, and M Sarwar. 2009. “Multidimensional Measures of Poverty & Well-Being.”

Government of Canada, Statistics Canada. 2022. “Infosheet: Quality of Life Framework for Canada.” March 30, 2022. <https://www160.statcan.gc.ca/infosheet-infofiche-eng.htm>.

New Zealand – Implementing the Well-being Budget : Well-being Economy Alliance.” n.d. Accessed December 13, 2024. <https://weall.org/resource/new-zealand-implementing-the-well-being-budget>.

OECD (2011), How's Life?: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264121164-en>.

OECD (2013), How's Life? 2013: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201392-en>.

OECD (2014), “Region of Southern Denmark (Denmark)”, in How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015), How's Life? 2015: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/how_life-2015-en.

OECD (2017), How's Life? 2017: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/how_life-2017-en.

OECD (2020), How's Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9870c393-en>.

OECD (2024), How's Life? 2024: Well-being and Resilience in Times of Crisis, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/90ba854a-en>.

Sen, Amartya. 1984. “The Living Standard.” Oxford Economic Papers 36:74–90.

Stiglitz, J.E., A. Sen and J.P. Fitoussi (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm (last accessed 22 July 2013).

Well-being Budget 2023: Support for Today Building for Tomorrow | The Treasury New Zealand.” 2023. May 18, 2023. <https://www.treasury.govt.nz/publications/well-being-budget/well-being-budget-2023-support-today-building-tomorrow>.

Indeks Regional *Well-being*: Penerapan OECD *Well-being Framework* ke dalam Konteks Indonesia



Upaya penerapan kerangka *well-being* di Indonesia sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif perlu diawali dengan pembangunan Indikator yang mencerminkan kerangka *well-being* tersebut. Pada bagian ini bagaimana kerangka *well-being* OECD diterjemahkan dalam konteks Indonesia dan bagaimana simulasi dari pembangunan indeks akan disajikan

Pemilihan Indikator untuk membangun Indeks Regional *Well-being* Indonesia

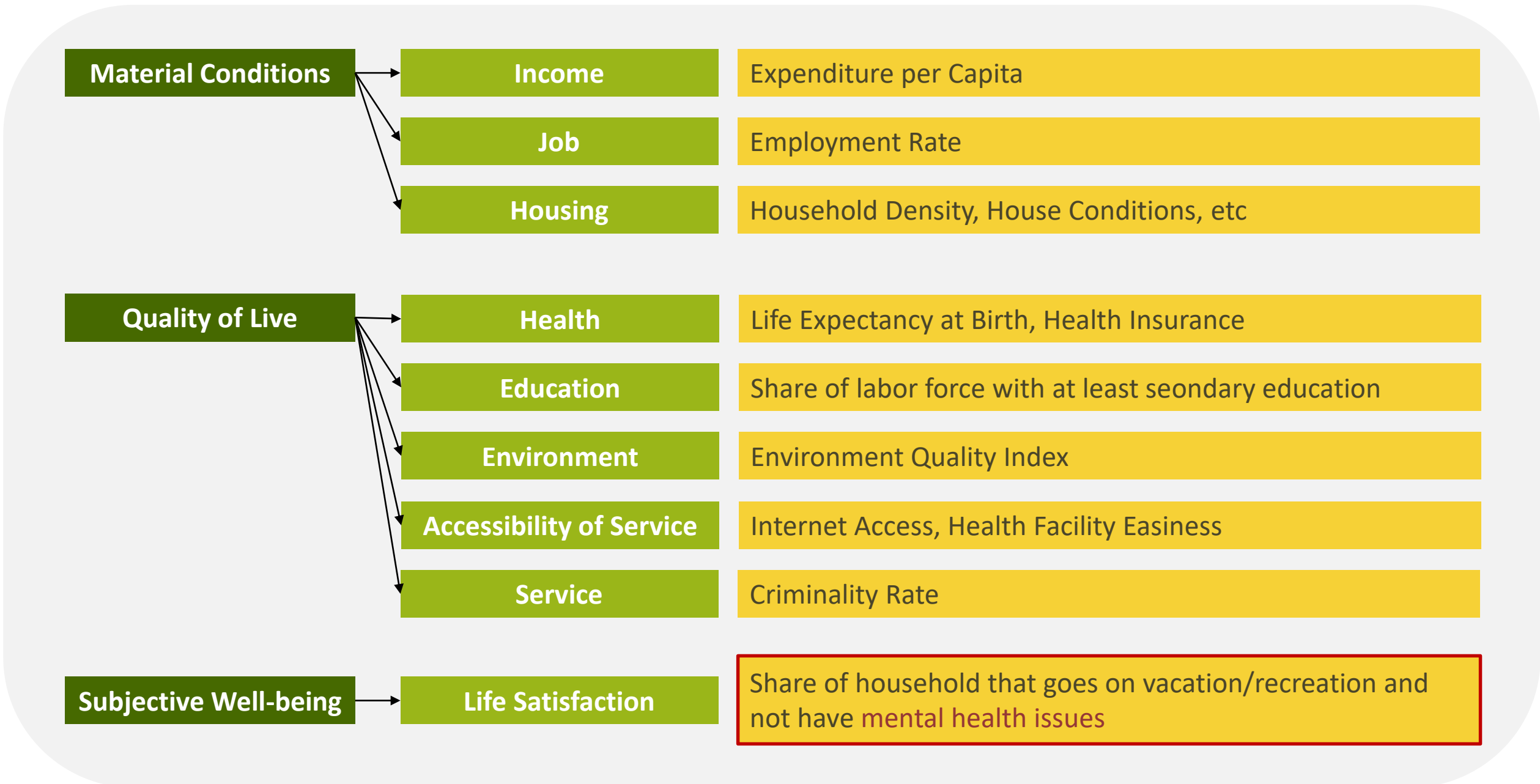
Pemetaan indikator indeks regional *well-being* Indonesia dengan *framework* regional *well-being* OECD sebagaimana Gambar 4. Berikut penjelasan masing-masing indikator.

1. Indikator Pendapatan: Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar dan menjadi *proxy* untuk pendapatan. Hal ini juga menunjukkan pola konsumsi yang dianggap sebagai indikator standar hidup, terutama di negara berkembang. Laporan Pembangunan Manusia UNDP menekankan pentingnya pengeluaran rumah tangga dalam mengukur kemiskinan dan kesejahteraan, sementara Bank Dunia menggunakan pengeluaran per kapita untuk menilai kemiskinan dan ketimpangan.

Sebagai perbandingan, Inggris Raya menggunakan pendapatan rumah tangga *disposable* riil per kapita untuk mengukur pendapatan setelah pajak dan inflasi (ONS *Well-being Framework*). Australia mengadopsi pendapatan rumah tangga yang disetarakan dengan penyesuaian ukuran rumah tangga (Australian Bureau of Statistics). Di AS, *Gallup-Sharecare Well-Being Index* menggunakan pendapatan rumah tangga tahunan. Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia fokus pada pendapatan *disposable* dan pengeluaran konsumsi untuk mencerminkan transfer sosial yang kuat dan kebijakan egaliter (OECD *Regional Well-being Framework*).

Gambar 4 - Indikator Indeks Regional *Well-being* Indonesia



Sumber: DJPK

2. Indikator Pekerjaan: Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran menunjukkan kemampuan wilayah menyediakan peluang kerja, mencerminkan partisipasi ekonomi dan keamanan kerja. OECD *Job Quality Framework* menekankan pentingnya pekerjaan bagi kesejahteraan.

Negara-negara menggunakan indikator pekerjaan untuk mencerminkan inklusi dan kualitas pasar kerja. Inggris Raya memakai *employment rate* dalam ONS *Well-being Framework* untuk mengukur proporsi usia kerja yang bekerja. Australia menggunakan *labor force participation rate* dan *underemployment rate* melalui Australian Bureau of Statistics untuk menggambarkan kapasitas dan efisiensi pasar kerja. Di AS, *Gallup-Sharecare Index* fokus pada *full-time employment for an employer* untuk menekankan stabilitas pekerjaan penuh waktu. Negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia memadukan *employment rate* dan *job quality* (stabilitas pekerjaan dan upah) untuk menunjukkan keberhasilan kebijakan egaliter mereka.

3. Indikator Perumahan: Kondisi Perumahan dan Kepadatan Rumah Tangga

Kondisi perumahan mencerminkan kualitas hidup, infrastruktur, dan akses utilitas. Kepadatan rumah tangga mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. UN-Habitat menegaskan pentingnya perumahan layak untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, tercermin dalam SDG 11.

Setiap negara mengevaluasi kesejahteraan perumahan berdasarkan prioritas lokal. Di Inggris Raya, ONS *Well-being Framework* menggunakan *overcrowding rate*. Australia fokus pada *housing affordability* melalui pengukuran proporsi pendapatan untuk biaya perumahan. Amerika Serikat melihat *homeownership rate* sebagai indikator stabilitas ekonomi. Negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia menilai perumahan lewat *housing quality indicators* dan *housing cost overburden rate*, menggabungkan aspek finansial dan kualitas fisik perumahan.

4. Indikator Kesehatan: Harapan Hidup saat Lahir

Harapan hidup mengukur hasil kesehatan suatu populasi dan mencerminkan akses ke perawatan kesehatan, nutrisi, dan faktor lingkungan. Ini adalah indikator penting dari pembangunan manusia dan kesejahteraan. WHO mengakui harapan hidup sebagai ukuran ringkasan kesehatan populasi.

Indikator kesehatan bervariasi antar negara tergantung kebijakan publik. Di Inggris Raya, ONS *Well-being Framework* menggunakan *healthy life expectancy* untuk kualitas hidup. Australia menggunakan *self-assessed health status* untuk persepsi individu tentang kesehatan mereka. Amerika Serikat mengukur *chronic disease prevalence* melalui *Gallup-Sharecare Well-Being Index*. Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia menggunakan kombinasi *life expectancy* dan *access to healthcare services* untuk kesetaraan akses layanan kesehatan dan hasil jangka panjang.

5. Indikator Pendidikan: Proporsi Tenaga Kerja dengan Minimal Pendidikan Menengah

Proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah menunjukkan tingkat modal manusia, akses pendidikan, dan peluang mobilitas sosial ekonomi. Pendidikan menengah meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan. OECD *Better Life Index* dan SDG 4 menekankan pentingnya akses pendidikan berkualitas.

Indikator pendidikan menggambarkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Di Inggris Raya, ONS *Well-being Framework* menggunakan indikator pencapaian pendidikan tertinggi. Australia menilai proporsi tenaga kerja dengan pendidikan menengah atau lebih tinggi melalui *Measuring Well-being* dari ABS. Di Amerika Serikat, *Gallup-Sharecare Well-Being Index* mengukur tingkat pendidikan anggota rumah tangga. Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia menggunakan tingkat kelulusan sekolah menengah dan pencapaian pendidikan tinggi untuk mencerminkan komitmen pada pendidikan berkualitas dan akses yang merata. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pendidikan untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial.

6. Indikator Lingkungan: Indeks Kualitas Lingkungan (EQI)

Indeks Kualitas Lingkungan mengukur kualitas udara dan air yang memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Lingkungan sehat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Indikator lingkungan dalam kesejahteraan menggambarkan kualitas hidup masyarakat.

Di Inggris Raya, ONS *Well-being Framework* menggunakan *air quality* untuk mengukur dampak kesehatan. Di Australia, *Measuring Well-being* menilai *environmental sustainability* untuk keberlanjutan jangka panjang. *Gallup-Sharecare Well-Being Index* di Amerika Serikat mengukur *access to clean water* sebagai kunci kualitas hidup. Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia menilai *environmental quality index* dan *green space availability*, menyoroti keseimbangan antara urbanisasi dan pelestarian alam. Pendekatan ini menunjukkan hubungan erat antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Aksesibilitas Layanan: Akses Internet dan Kemudahan Fasilitas Kesehatan

Akses internet mencerminkan inklusi digital serta membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Fasilitas kesehatan mengukur akses layanan penting yang mempengaruhi hasil kesehatan. Indikator aksesibilitas layanan dalam kesejahteraan menilai kemampuan masyarakat mengakses layanan dasar.

Di Inggris Raya, ONS *Well-being Framework* menggunakan indikator akses layanan kesehatan untuk mengukur keadilan distribusi layanan kesehatan. Di Australia, ABS mengandalkan indikator akses internet untuk menilai kesetaraan akses informasi dan layanan digital. Di Amerika Serikat, *Gallup-Sharecare Well-Being Index* mengukur kemudahan akses layanan kesehatan dengan mempertimbangkan waktu tunggu dan biaya. Negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia menggunakan indikator akses layanan kesehatan dan akses transportasi publik untuk menekankan infrastruktur inklusif. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya akses adil terhadap layanan dasar untuk mendukung kualitas hidup.

8. Indikator Keamanan: Tingkat Kriminalitas

Keamanan adalah aspek penting dari kesejahteraan, karena tingkat kejahatan yang tinggi berpengaruh negatif pada kesehatan mental, kepercayaan pada institusi, dan kualitas hidup. OECD *Regional Well-being Framework* memasukkan keamanan sebagai dimensi kunci.

Beberapa negara menggunakan indikator keamanan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat mereka:

- Inggris Raya: ONS *Well-being Framework* dengan *crime rate*
- Australia: *Measuring Well-being* oleh Australian Bureau of Statistics dengan *perceived safety*
- Amerika Serikat: *Gallup-Sharecare Well-Being Index* dengan *safety of neighborhoods*
- Negara-negara Nordik: *Personal security* dan *trust in police*

Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan yang aman untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

9. Indikator Kepuasan Hidup: Proporsi Rumah Tangga yang Terlibat dalam Rekreasi dan Tidak Memiliki Masalah Kesehatan Mental

Partisipasi dalam kegiatan rekreasi mencerminkan waktu luang, relaksasi, dan akses ke fasilitas budaya atau alam, yang berkontribusi pada kesejahteraan subjektif. Kesehatan mental yang baik menunjukkan ketahanan psikologis dan kualitas hidup. OECD *Better Life Index* dan Laporan Kebahagiaan Dunia menekankan pentingnya rekreasi dan kesehatan mental bagi kepuasan hidup.

Kepuasan hidup mengukur persepsi individu terhadap kualitas hidup mereka. Di Inggris Raya, ONS *Well-being Framework* menggunakan indikator *life satisfaction* untuk menilai kesejahteraan emosional masyarakat. Di Australia, Australian Bureau of Statistics menggunakan *subjective well-being* untuk mengukur kebahagiaan dan kepuasan hidup. Di Amerika Serikat, *Gallup-Sharecare Well-Being Index* menggunakan *overall life satisfaction* untuk menilai kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia juga mempertimbangkan *work-life balance* sebagai faktor utama dalam kesejahteraan dan kepuasan hidup. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepuasan hidup adalah indikator kunci yang mencakup dimensi psikologis, emosional, dan sosial dari kesejahteraan.

■ ■ Perhitungan Indeks Regional *Well-being* Indonesia

Perhitungan Indeks menggunakan Metode Min-Max adalah salah satu teknik yang umum digunakan untuk menskalakan dan menstandarkan data pada skala yang konsisten, memungkinkan perbandingan antar indikator yang berbeda dalam sebuah *framework* kesejahteraan, seperti yang diterapkan dalam OECD *Regional Well-being Framework*. Metode ini berfungsi untuk mengubah nilai setiap indikator ke dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 hingga 1, untuk memudahkan penggabungan dan analisis secara komprehensif.

Dalam metode Min-Max, langkah pertama adalah mengidentifikasi nilai minimum dan maksimum dari data yang tersedia untuk setiap indikator. Nilai minimum adalah nilai terendah yang tercatat untuk indikator tersebut, sementara maksimum adalah nilai tertinggi yang tercatat. Setelah nilai ini diketahui, setiap nilai individu dari indikator dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\hat{x}_i = \left(\frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \right)$$

Hasil dari perhitungan ini adalah angka yang berada di antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan posisi terendah (nilai minimum) dan nilai 1 menunjukkan posisi tertinggi (nilai maksimum) dalam rentang indikator tersebut. Penggunaan metode Min-Max ini memungkinkan konsistensi dalam perbandingan antar indikator yang memiliki satuan atau skala yang berbeda. Misalnya, untuk indikator pendapatan yang diukur dalam satuan rupiah atau dolar, serta indikator tingkat pekerjaan yang diukur dalam persentase, keduanya dapat dikonversi menjadi angka yang berada dalam rentang yang sama, yaitu 0 hingga 1. Ini membuat data lebih mudah untuk digabungkan atau dianalisis lebih lanjut.

Penting untuk dicatat bahwa metode Min-Max ini sensitif terhadap nilai ekstrem (*outliers*). Jika terdapat nilai yang sangat tinggi atau rendah yang jauh di luar kisaran umum, hal ini dapat mempengaruhi rentang dan hasil normalisasi, sehingga harus dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap data tersebut. Meskipun demikian, metode ini tetap menjadi cara yang efektif untuk mengurangi perbedaan skala antar indikator, memungkinkan perbandingan antar wilayah atau waktu dalam konteks OECD *Regional Well-being Framework*.

Dengan pendekatan ini, berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan regional—seperti pendapatan, pekerjaan, perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, aksesibilitas layanan, keamanan, dan kepuasan hidup—dapat disatukan dalam satu indeks kesejahteraan yang komprehensif. Indeks ini kemudian dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kesejahteraan di berbagai daerah, serta memfasilitasi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

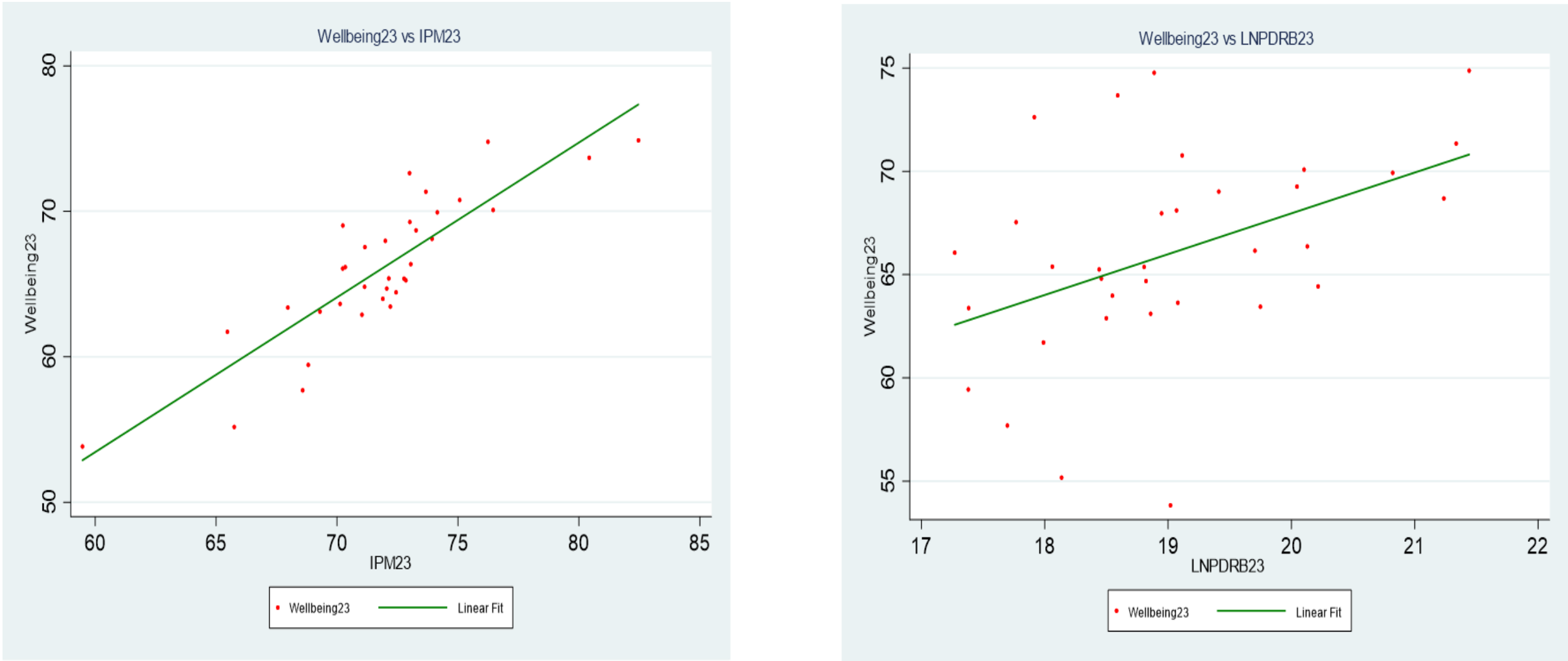
Namun, pada indikator yang diukur dengan **Lower is Better**, seperti tingkat kriminalitas, kemiskinan ekstrem, atau tingkat pengangguran, nilai yang lebih rendah menunjukkan kesejahteraan yang lebih baik. Dalam hal ini, rumus Min-Max perlu disesuaikan agar nilai yang lebih rendah tidak "terbalik" dalam skor yang lebih tinggi. Untuk indikator *Lower is Better*, perhitungan dapat dimodifikasi dengan membalikkan proses normalisasi. Hal ini dilakukan dengan mengubah rumus Min-Max menjadi:

$$\check{x}_i = \left(\frac{\max(x) - x_i}{\max(x) - \min(x)} \right) \times 10$$

Dengan cara ini, nilai yang lebih rendah dari indikator tersebut akan menghasilkan skor yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip bahwa nilai yang lebih rendah lebih baik.

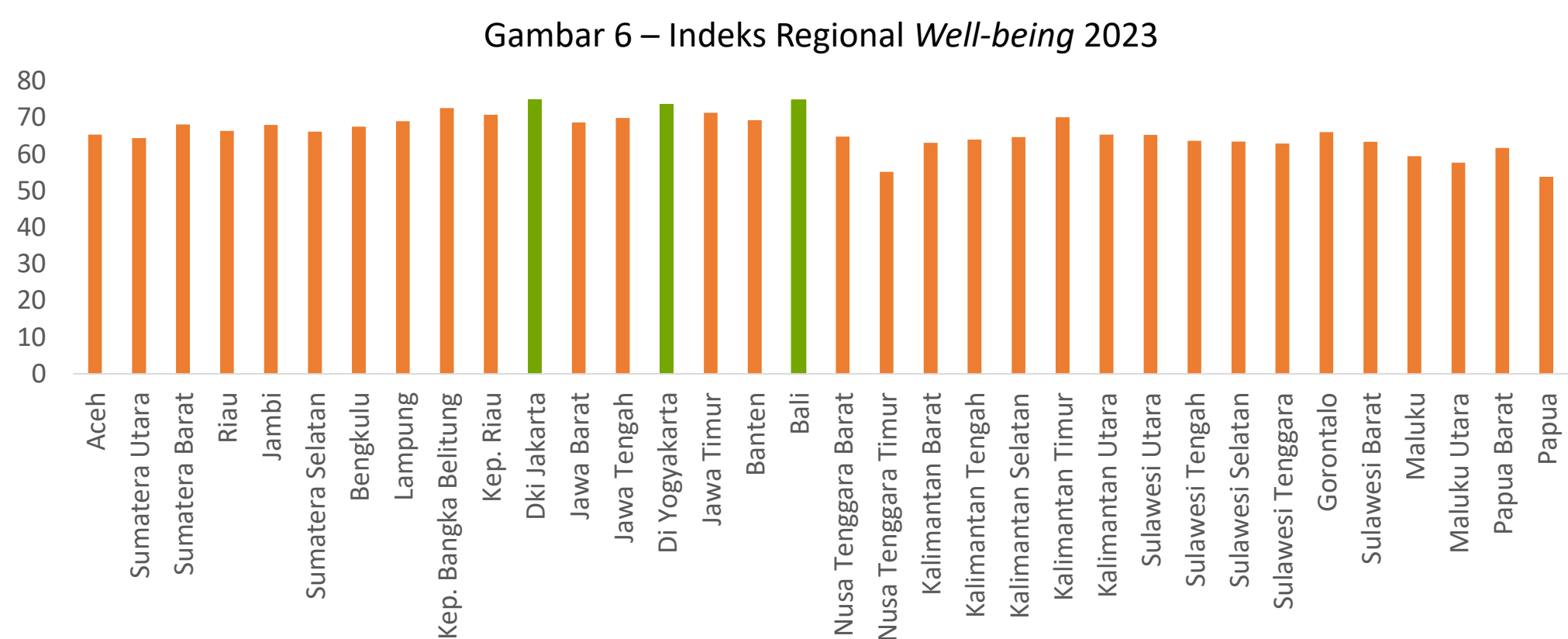
Simulasi Awal Indeks Regional *Well-being* dan *Robustness Check*

Gambar 5 – Scatterplot Indeks Well-being dengan IPM dan PDRB



Sumber: DJPK, data diolah

Hasil perhitungan awal Indeks Regional *Well-being* menggunakan data susenas tahun 2023 menunjukkan pola hubungan yang konsisten dan sejalan dengan landasan teoritisnya. Di mana pada gambar 5, Indeks Regional *Well-being* memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Pembangunan Manusia dan juga kondisi ekonomi suatu daerah yang dicerminkan dari PDRB.



Sumber: DJPK, data diolah

Selain itu, simulasi Indeks Regional *Well-being* sesuai Gambar 6 menunjukkan bahwa DIY, yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi namun indeks regional *well-being* tinggi, cukup menarik untuk diamati. Selain itu, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Bali juga merupakan daerah dengan Indeks Regional *Well-being* yang tinggi. Hasil dari IWB ini memberikan gambaran bahwa melihat aspek kesejahteraan dapat dilihat dari perspektif yang luas, tidak hanya dari aspek daya beli masyarakat. Aplikasi indeks *well-being* ini menjadi ukuran penting dalam evaluasi pencapaian pembangunan Indonesia yang inklusif. Oleh karena itu, perlu kita juga perlu melihat bagaimana hubungan indikator pembangunan ekonomi inkluasif Indonesia terhadap *well-being index* di Indonesia.

■ ■ **Indeks Regional *Well-being* dan Pembangunan Inklusivitas di Indonesia**

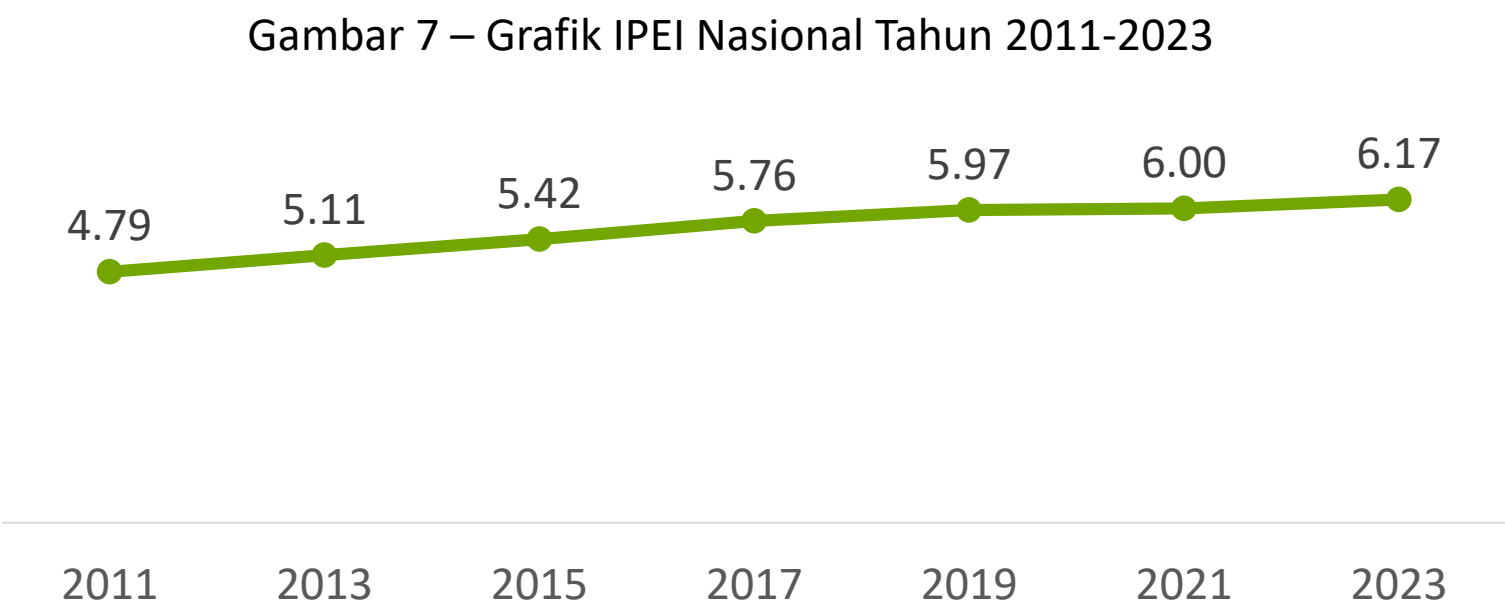
Salah satu tujuan penyusunan Indeks Regional *Well-being* yaitu mendukung pemerataan layanan publik dan kesejahteraan. Upaya pemerataan hasil pembangunan di Indonesia telah dirintis melalui penyusunan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Latar belakang penyusunan IPEI yaitu indeks pembangunan atau pertumbuhan inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional, dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik. Adapun manfaat IPEI di Indonesia yaitu dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar provinsi atau kabupaten dan kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk tiap provinsi dan keselarasannya dengan tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, analisis hubungan antara Indeks Regional *Well-being* dan IPEI diperlukan untuk melihat keselarasan di antara keduanya.

Tabel 1 – Pilar dan Sub-Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pilar	Pertumbuhan Ekonomi Tinggi	Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	Perluasan Akses dan Kesempatan
Sub-Pilar	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Kesempatan kerja 3. Infrastruktur ekonomi	1. Ketimpangan 2. Kemiskinan	1. Kapabilitas manusia 2. Infrastruktur dasar 3. Keuangan inklusif

Sumber: Bappenas (2019), diolah

Bappenas (2019) mendefinisikan Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Adapun pembangunan ekonomi inklusif terdiri dari 3 pilar, disertai 8 sub-pilar sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, dan diterjemahkan kepada 21 indikator. 3 pilar dimaksud terdiri dari pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan.

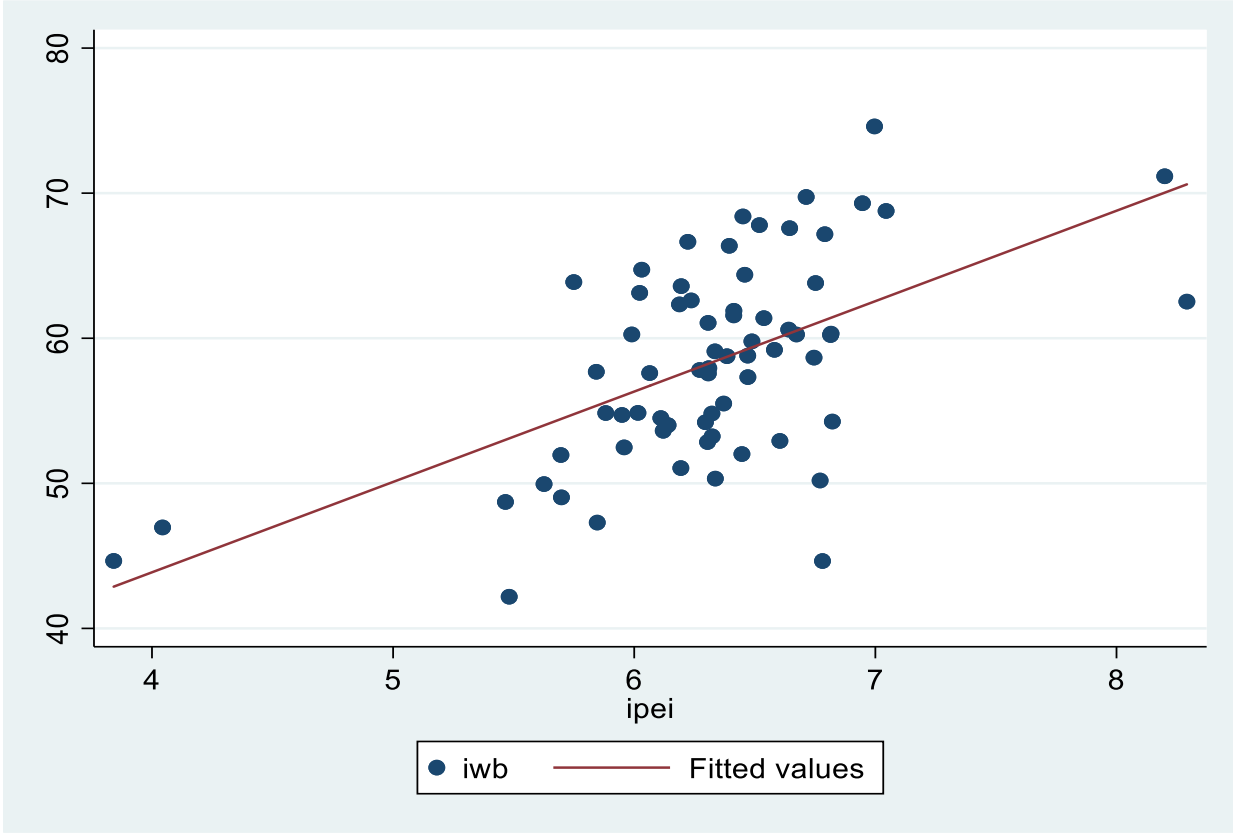


Sumber: Bappenas, diolah

Perkembangan IPEI terus meningkat secara konsisten dari tahun 2011 hingga 2023. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7, data IPEI tahun 2023 sebesar 6,17, yang merupakan yang tertinggi sejak rilis pada tahun 2011. Daerah dengan IPEI tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi DKI Jakarta (8,2), Bali (7,04), dan Bangka Belitung (7,0). Sementara itu, daerah dengan IPEI terendah adalah Provinsi Gorontalo (5,75), Nusa Tenggara Timur (5,63), dan Provinsi Papua (4,04). Dalam skala penilaian IPEI, nilai 1-3 dikategorikan tidak memuaskan, nilai 4-7 memuaskan, dan 8-10 sangat memuaskan.

Sesuai tujuan penyusunan IPEI yang akan menunjukkan inklusivitas dalam proses pembangunan, analisis keterkaitan antara IPEI dan Indeks Regional *Well-being* akan melihat keselarasan keduanya dalam konteks pembangunan yang inklusif. Dugaan yang dapat dibangun dalam analisis tersebut adalah keduanya akan menunjukkan keselarasan pada tingkat tertentu karena beberapa indikator yang digunakan keduanya sama dan sumbernya berasal dari Susenas. Secara sederhana, analisis hubungan tersebut akan dilakukan dengan analisis korelasi dan regresi data panel *random effect*.

Gambar 8 – Korelasi Indeks *Well-being* dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Tahun 2022-2023



Sumber: DJPK, 2024

Gambar 9 – Regresi Data Panel Random Effect

IPEI	3,33***
SPM Pendidikan	0,42***
R-sq:	
within	0,799
between	0,74
overall	0,76
Number of obs	68

Sumber: DJPK, 2024

Analisis korelasi antara Indeks Regional *Well-being* dan IPEI dilakukan dengan ruang lingkup provinsi tahun 2022 dan 2023. Sebagaimana ditampilkan pada gambar di atas, korelasi antara Indeks Regional *Well-being* dan IPEI menunjukkan hasil yang positif. Adapun koefisien korelasi antar keduanya sebesar 0,57. Hal ini menunjukkan seiring kenaikan IWB, terjadi kenaikan juga terhadap variabel Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Selain korelasi, analisis regresi data panel *random effect* (RE) dilakukan untuk memperlihatkan indikasi hubungan antar variabel Indeks Regional *Well-being* (IRW). Analisis data panel RE dipilih setelah Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Sesuai tabel di atas, peningkatan variabel IPEI menunjukkan indikasi dampak terhadap IRW. Analisis korelasi dan regresi data panel *random effect* menunjukkan bahwa peningkatan IRW selaras dengan peningkatan IPEI. Dengan demikian, IRW dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan strategi dalam mendorong perekonomian yang inklusif.

Selanjutnya, untuk memperkuat penerapan Indeks Regional *Well-being* ke depan, pembelajaran dari berbagai negara dalam menerapkan *well-being budget* perlu dijadikan contoh bagi Indonesia. Oleh karena itu, pada tulisan berikutnya akan disajikan bagaimana penerapan kerangka *well-being* di Australia dan apa pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia.

Framework Well-being pada Kebijakan Pemerintah di Australia dan Bagaimana Indonesia dapat Menerapkannya ke Depan

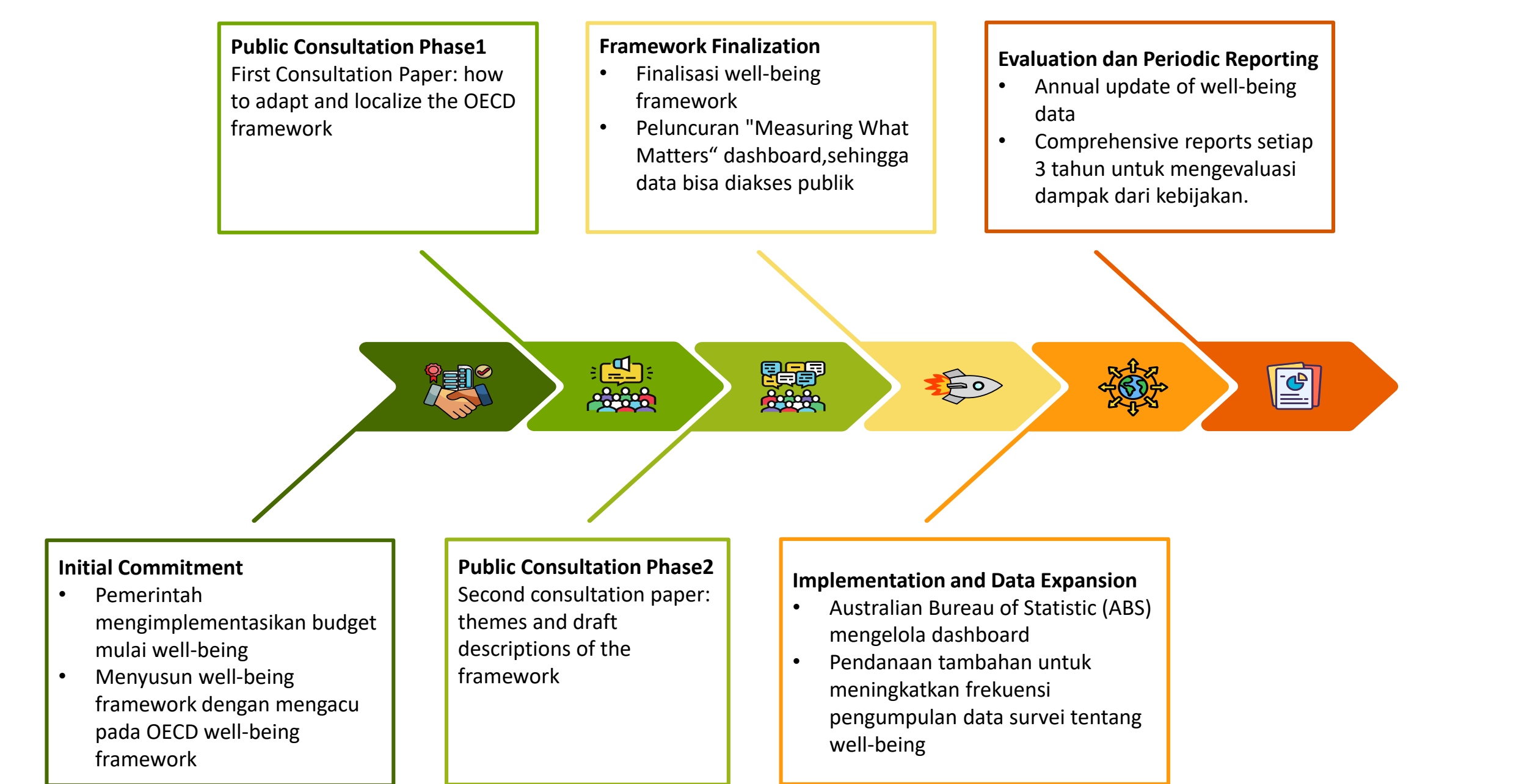


Penerapan Framework Well-being di Australia

Pada tahun 2022, Australia mulai mengintegrasikan *well-being* ke dalam proses penganggaran, mengikuti jejak negara lain seperti Selandia Baru dan Kanada. Pemerintah Australia menyadari bahwa indikator ekonomi seperti PDB, tingkat pengangguran, dan inflasi tidak selalu mencerminkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk menilai kesejahteraan. Dengan mengintegrasikan *well-being* ke dalam proses penganggaran, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas hidup.

Tahapan pengembangan *well-being framework* di Australia dimulai dengan implementasi *well-being budget* pada tahun 2022 yang diikuti dengan penyusunan *well-being framework*. Pada tahap awal ini, *well-being framework* Australia mengacu kepada OECD sebagai *starting point*, kemudian diadopsi sesuai dengan konteks Australia. Untuk menggali masukan dari para *stakeholder*, Treasury melakukan *public consultation* yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian, organisasi nirlaba, dan para pelaku bisnis. Meskipun memakan waktu, mekanisme *public consultation* ini sangat krusial untuk mencari indikator yang merefleksikan hal yang penting bagi masyarakat Australia. Tahapan selanjutnya adalah finalisasi *well-being framework* dan *dashboard* yang menggambarkan progres dari indikator-indikator pembentuknya, sehingga dapat diakses dan dipantau oleh publik. Selanjutnya, Australian Bureau of Statistic (ABS) ditugaskan untuk mengelola dashboard, meningkatkan frekuensi pengumpulan data survei, melakukan pembaruan data secara tahunan, serta penyusunan laporan komprehensif untuk melihat dampak dari kebijakan berbasis *well-being*. Proses ini menunjukkan pendekatan inklusif dan *evidence-based* yang dilakukan Pemerintah Australia untuk memastikan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan *well-being* dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.

Gambar 10 - Tahapan Pengembangan Well-being Framework di Australia



Australia mengembangkan *well-being framework* dengan prinsip “*Measuring What Matters*” yang menekankan pada hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat Australia. Australia’s *well-being framework* ini terdiri dari 5 tema yang menggambarkan visi masyarakat Australia, yaitu:

- *healthy*, dimana setiap orang memiliki kesehatan fisik serta mental yang baik, dapat mengakses layanan saat diperlukan, dan memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil tindakan terkait kesehatan;
- *secure*, dimana masyarakat dapat hidup damai, merasa aman, memiliki keamanan finansial, dan akses ke perumahan.;
- *sustainable*, ketika masyarakat menggunakan sumber daya alam dan finansial secara berkelanjutan serta menjaga dan memperbaiki lingkungan;
- *cohesive*, masyarakat yang mendukung koneksi dengan keluarga, teman, dan komunitas, menghargai keberagaman dan nilai-nilai budaya; dan
- *prosperous*, masyarakat dengan ekonomi yang dinamis dan kuat, mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan masyarakat, serta tersedia peluang yang luas untuk pekerjaan dengan gaji yang layak.

Selanjutnya, untuk mempermudah menentukan langkah *intermediate* yang harus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya, lima tema tersebut kemudian dijabarkan menjadi 50 indikator. Indikator-indikator tersebut akan digunakan dalam jangka panjang agar dapat diukur *progress*-nya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator-indikator yang dipilih sebagai pembentuk *well-being framework* tersebut harus relevan, lengkap, terukur, *comparable*, *reliable*, dan *understandable*.

Gambar 11 – Indikator *Best Practice Framework Well-being* di Australia

HEALTHY	SECURE	SUSTAINABLE	COHESIVE	PROSPEROUS
Healthy throughout life • Life expectancy • Mental health • Prevalence of chronic conditions	Living peacefully and feeling safe • Feeling of safety • Experience of violence • Childhood experience of abuse • Online safety National safety • Access to justice	Protect, repair and manage the environment • Emissions reduction • Air quality • Protected areas • Biological diversity • Resource use and waste generation	Having time for family and community • Time for recreation and social interaction • Social connections • Creative and cultural engagement	Dynamic economy that shares prosperity • National income per capital • Productivity • Household income and wealth • Income and wealth inequality • Innovation
			Valuing diversity, belonging and culture • Experience of discrimination • Acceptance of diversity • First Nations languages spoken • Sense of belonging	Access to education, skills development and learning throughout life • Childhood development • Literacy and numeracy skills at school • Education attainment • Skills development • Digital preparedness
Equitable access to quality health and care services • Access to health services • Access to care and support services	Having financial security and access to housing • Making ends meet • Homelessness • Housing serviceability	Resilient and sustainable nation • Fiscal sustainability • Economic resilience • Climate resilience	Trust in institutions • Trust in others • Trust in key institutions • Trust in Australian public services • Trust in national government • Representation in parliament	Broad opportunities for employment and well-paid, secure jobs • Wages • Job opportunities • Broadening access to work • Job satisfaction • Secure jobs

Australia mengacu OECD dalam penyusunan *well-being framework*, namun dalam implementasinya Australia belum menyusun indeks komposit tunggal yang menggabungkan semua indikator *well-being* tersebut menjadi satu nilai agregat, seperti yang dilakukan oleh OECD dengan *Better Life Index*. Australia menggunakan indikator individual dengan data yang diperbarui secara berkala melalui *dashboard*, untuk menilai dan memantau perkembangan kesejahteraan masyarakatnya.

Meskipun tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan terkait nominal *well-being budget* Australia, namun pada tahun 2023-2024 pengeluaran Pemerintah Australia untuk sektor kesehatan, aged-care, dan olahraga adalah sebesar \$137,6 miliar. Kemudian, untuk tahun 2024-2025 dengan visi untuk menciptakan Australia yang lebih bugar dan sehat, Pemerintah Australia mengalokasikan dana sebesar \$1,3 miliar untuk pencegahan penyakit, pendeteksian dini penyakit, pengobatan kondisi kronis, serta olahraga untuk mendorong kehidupan yang lebih aktif dan sehat.

Dari penerapan *well-being framework* di Australia, terdapat beberapa *lesson learned* yang dapat menjadi pertimbangan Indonesia sebelum mengembangkan indeks *well-being*, diantaranya:

- Kesejahteraan tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, sehingga Indonesia perlu juga membangun indikator kesejahteraan yang mencakup dimensi sosial dan lingkungan tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan.
- Australia menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebijakan (melalui *public consultation*), dapat membangun kesadaran publik dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan legitimasi pemerintah.
- Australia mengembangkan *well-being framework* didasarkan pada evaluasi berbasis data. Pelaporan yang didasarkan pada gender, lokasi, dan status sosial ekonomi, juga dapat memberikan *highlights* pada hal-hal prioritas yang paling membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur, Pemerintah dapat melacak kemajuan dan mengevaluasi dampak kebijakan. Pengukuran ini juga juga dapat digunakan sebagai *evidence based* bagi para pembuat kebijakan, termasuk dalam pengusulan anggaran.

■ ■ Implementasi Indeks Regional *Well-being* dalam Intervensi Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Penggunaan Indeks Regional *Well-being* (IRW) dalam alokasi anggaran merupakan hal yang krusial dalam melaksanakan pembangunan. Penerapan *well-being budget* yang telah lama diimplementasikan di negara-negara lain seperti Selandia Baru, Australia, Skotlandia, dan Kanada perlu dijadikan referensi bagi Indonesia dalam intervensi kebijakan.

Implementasi IRW di tingkat regional di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, memprioritaskan investasi strategis, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan IRW, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan berbasis bukti yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. IRW juga relevan untuk kebijakan regional karena mampu memberikan gambaran multidimensional tentang kesejahteraan masyarakat. Informasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih terarah dan responsif.

Bagaimana penerapan Indeks Regional *Well-being* dalam ranah kebijakan dan strategi implementasi indeks tersebut dalam penyusunan anggaran di daerah, beberapa yang dapat dilakukan antara lain:

a. Integrasi Indeks *Well-being* dalam Perencanaan Daerah dan Kaitannya dengan KEM PPKF

Mengintegrasikan Indeks Regional *Well-being* dalam perencanaan daerah memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Strategi utama dalam integrasi ini adalah menjadikan hasil Indeks *Well-being* daerah dalam prioritas program-program yang secara langsung meningkatkan indikator kesejahteraan seperti perumahan layak, pengelolaan limbah, penanganan stunting serta penanganan kemiskinan ekstrem.

Pada level nasional, Indeks Regional *Well-being* ini menjadi indikator dasar multidimensi dalam penentuan model penyalarsan kemiskinan dari pusat dan daerah sebagai output dari dokumen KEM PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Dokumen ini memuat arah kebijakan ekonomi makro, asumsi dasar ekonomi, serta prioritas kebijakan fiskal dalam penyusunan APBN/APBD.

Integrasi Indeks Regional *Well-being* ke dalam perencanaan daerah yang memiliki kaitan erat dengan KEM PPKF bermanfaat dalam hal:

■ Alokasi Anggaran

Penggunaan Anggaran yang Lebih Efektif: Indikator *Well-being* memungkinkan alokasi APBD yang lebih terarah, seperti untuk meningkatkan layanan sosial di wilayah yang kesejahteraannya rendah. Indeks tersebut juga dapat dimantaatkan sebagai basis penentuan **lokasi prioritas** intervensi fiskal agar lebih tepat sasaran.

Kebijakan Fiskal yang Inklusif: Dalam KEM PPKF, kebijakan fiskal diarahkan untuk menciptakan pemerataan, yang selaras dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

■ Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Penilaian Capaian Target KEM PPKF: Hasil Indeks Regional *Well-being* dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan fiskal yang dirancang dalam KEM PPKF. Jika kesejahteraan meningkat, artinya kebijakan berhasil.

■ Manfaat Lainnya dalam Kebijakan yang Dimasukkan dalam KEM PPKF

Kebijakan yang Holistik: Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi (seperti peningkatan PDRB), tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan.

b. Penguatan Data dan Pemilihan Indikator agar lebih *acceptable*

Berkaca dari implementasi *wellbeing budget* di Australia, penyusunan Indeks Regional Wellbeing di Indonesia perlu melalui beberapa tahap agar indikator dan yang digunakan dapat diterima oleh semua stakeholders khususnya di daerah. Setelah model Indeks Regional Wellbeing dibangun, pemerintah perlu melaksanakan **uji publik** di daerah untuk mendapatkan masukan dari pemda dan masyarakat berkenaan dengan pemilihan indikator yang tepat untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu daerah. Di dalam uji publik tersebut, diharapkan diskusi dan masukan dari stakeholders akan memperkuat justifikasi dari penerapan kerangka wellbeing di Indonesia. Sebagai contoh, untuk menilai kualitas kesehatan, apakah angka harapan hidup saat lahir dan akses terhadap asuransi kesehatan cukup representatif untuk dipakai menilai tingkat kesejahteraan individu pada aspek kesehatan, atau apakah ada variabel lain yang diperlukan untuk memperkaya pendefinisian tingkat wellbeing pada aspek kesehatan.

Selanjutnya, setelah dilakukan uji publik, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah identifikasi ketersediaan sumber data dalam Susenas (Survey tahunan) yang dilakukan oleh BPS untuk melihat apakah terdapat *gap* informasi yang telah tersedia dalam pertanyaan Susenas. Jika terdapat aspirasi publik yang tidak terdapat dalam blok survey Susenas, maka pemerintah dapat bersinergi dengan BPS untuk melakukan pemutakhiran pertanyaan survey agar Indeks Regional Wellbeing dapat dibangun secara lebih komprehensif dan *acceptable*. Dengan semakin *reliable* nya Indeks Regional Wellbeing maka efektivitas dan efisiensi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dapat terus ditingkatkan.





**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

Luky Alfirman • Adriyanto • Ludiyo • Purwanto • Sandy Firdaus • Lydia K Christyana • Agung Widiadi •
Radies Kusprihanto Purbo • Britany A. Sembiring • Muhammad Hijrah • Rian Kelana Ednur • Ananta Sugiyarto • Rossi
Rizki Bestari • Adi Saputra • Amelia Imanda Yusuf • M. Harry Kurniawan • Magdalena Pohan • Bramadhona • Brama
Yudha Kusmara • Kharisma Permata Karunianingtyas • Haris Dwi Faisal • Yuliza • Jimi Saputro